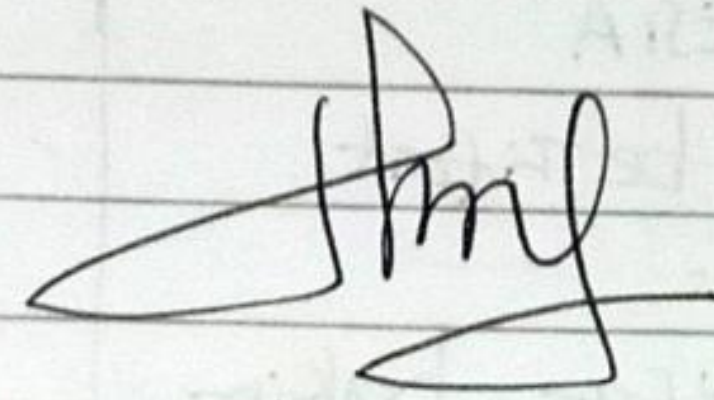


TUGAS!

Kamis, 21 Oktober 2021

Nama : Venny Fransisca Febriyany
 NPM : 1812011020
 Mata Kuliah : Perbandingan Hukum Pidana
 Dosen : Emilia Susanti, S.H., M.H.



INDONESIA	BELGIA	SINGAPURA
- Bentuk negara Republik - Terdapat Undang-Undang tertulis yang menjadi acuan bagi penegakan hukum di Indonesia - Menjunjung Hak Asasi Manusia - KUHP Indonesia mengatur hal-hal bersifat umum. - Terdiri dari 3 buku, yaitu Buku I, Buku II, dan Buku III - Berlaku umum dan semua agama - Jumlah Bab dalam KUHP Indonesia relatif banyak - Pendahuluan dan penjelasan terpisah. - Jenis-jenis kejahatan memiliki bab tersendiri. - Sebagian besar jenis kejahatan dianggap ringan - Tidak mengatur hal-hal yang notabene bersifat perdata.	- Penegakan hukum di Belgia Serikat adalah tanggung-jawab utama Badan Kepolisian dan Departemen Shift. - Kepolisian negara bagian memberikan pelayanan yang lebih luas. - Masing-masing negara bagian memiliki sistem peradilan pidana sendiri. - Terdapat empat sumber hukum yaitu hukum konstitusi, hukum administratif, statuta (hukum resmi yang tertulis di suatu negara), dan Common Law. - Bentuk negara Belgia yaitu negara federal - Kepolisian menjadi pintu utama dalam hal melakukan kontak pertama dengan seorang tersangka. - Polisi dipaksa untuk membuat keputusan penting terkait tentang kelanjutan dari tersangka tersebut.	- Bentuk negara Republik - Terdapat Undang-Undang tertulis - Terdapat Hak Asasi Manusia - Sistem pemerintahan parlemen. - Kepala negara yaitu Presiden - Terdapat Perdana Menteri. - Konsep Undang-Undang dasar diturunkan dari Malaysia. - Negara unitar dengan Pemerintah Pusat yang kuat. - Tidak memiliki Pemerintah Lokal - Terdapat majelis kota yang memiliki kewenangan terbatas. - Masa jabatan Presiden 6 tahun - Pemilihan langsung oleh Rakyat - Menyediakan majelis penasihat Presiden.

INDONESIA	BELGIA	SINGAPURA
- Hakim berifat aktif. - Keputusan hakim tidak dapat diganggu gugat - Pemisahan ruang dan struktur sidang bagi pengadilan Anak dan militer.	- Penuntut umum adalah pejabat terpilih atau diunjuk yang memegang peringkat teratas dalam komunitas penegak hukum. - Penuntut umum bertanggung jawab atas seluruh koordinasi yang berkaitan dengan aktifitas pengadilan - Terdapat sistem pengadilan ganda - Lebih mengedepan sistem juri bukan hakim.	- Peran Presiden Pasif - Pengadilan Banding adalah yang tertinggi. - Pengadilan Banding terdiri dari seorang ketua Pengadilan dan 2 hakim pengadilan banding. - Pengadilan tinggi terdiri dari seorang ketua pengadilan dan hakim-hakim pengadilan tinggi. - Hakim pengadilan tinggi bekerja sendiri. - Pengadilan tinggi memeriksa perkara perdata dan pidana. - Yurisdiksi berlaku pada semua perkara. - Hanya hakim pengadilan tinggi yang berwenang meminta arsip dari pengadilan. - Sebagian yang umum di Indonesia menjadi khusus di Singapura. - Tidak terdiri dari beberapa bagian.